

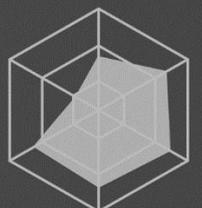
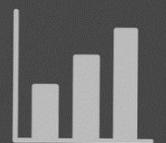
# PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA MAGELANG MENURUT PENGELUARAN

## 2015-2019



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO  
KOTA MAGELANG  
MENURUT PENGELUARAN**

**2015-2019**



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO  
KOTA MAGELANG  
MENURUT PENGELUARAN  
2015 - 2019**

ISSN : 2686-2727  
Nomor Publikasi : 33710.2005  
Katalog BPS : 9302020.3371  
Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm  
Jumlah Halaman : xiv + 57 halaman

Penyusun :  
Badan Pusat Statistik Kota Magelang

Gambar Kulit :  
Badan Pusat Statistik Kota Magelang

Foto Gambar Kulit :  
Bagian Prokompin Setda Kota Magelang

Diterbitkan Oleh :  
©Badan Pusat Statistik Kota Magelang

Dicetak Oleh :  
TM Advertising

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

## **TIM PENYUSUN**

### **Penanggungjawab Umum:**

Sri Herawati, S.Si, MM.

### **Penyunting:**

Heny Khristianawati, S.Si, M.M

### **Penulis:**

Rini Tri Widiyastuti, S.ST, M.Si.

Rifki Hamdani, SST, M.Si.

### **Pengolah Data:**

Rini Tri Widiyastuti, S.ST, M.Si

### **Gambar Kulit:**

Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik



## KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu: (i) pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut Lapangan Usaha/*industry*), (ii) pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut Pengeluaran/*expenditure*), dan (iii) pendekatan pendapatan (PDRB menurut Pendapatan/*income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Daerah, Impor Luar Daerah. Data PDRB dalam publikasi ini menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Magelang, Mei 2020

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
Kota Magelang,

**Sri Herawati, S.Si, MM.**



## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vii
Daftar Tabel .....	ix
Daftar Gambar .....	xi
Daftar Lampiran .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	3
1.2. Kegunaan Statistik PDRB.....	4
BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA .....	7
2.1. Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PKRT) .....	9
2.2. Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT (PKLNPRT) .....	12
2.3. Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PKP) .....	14
2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) .....	16
2.5. Perubahan Inventori .....	20
2.6. Ekspor Impor Barang dan Jasa .....	23
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN KOTA MAGELANG BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN TAHUN 2015-2019 .....	25
3.1. Tinjauan Agregat PDRB Kota Magelang menurut Pengeluaran .....	27
3.2. Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga .....	32
3.3. Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT .....	34
3.4. Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah .....	34
3.5. Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) .....	36
3.6. Perkembangan Perubahan Inventori .....	36
3.7. Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa .....	38

PENUTUP .....	41
LAMPIRAN .....	45
DAFTAR PUSTAKA .....	55

<https://magelangkota.bps.go.id>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran, 2015 - 2019 ( <i>Juta Rp</i> ) ...	27
Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran, 2015 - 2019 ( <i>Juta Rupiah</i> ) .....	28
Tabel 3. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran, 2015 - 2019 ( <i>Persen</i> ) .....	29
Tabel 4. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran, 2015 - 2019 ( <i>Persen</i> ) .....	31
Tabel 5. Indeks Harga Implisit PDRB menurut Pengeluaran, 2015 - 2019 ( <i>Persen</i> ) .....	31
Tabel 6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga 2015 - 2019 .....	32
Tabel 7. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT, 2015 - 2019 .....	34
Tabel 8. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah, 2015 - 2019 .....	35
Tabel 9. Perkembangan dan Struktur PMTB, 2015 - 2019 .....	36
Tabel 10. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori, 2015 - 2019 .....	37
Tabel 11. Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa, 2015 - 2019 .....	39



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran ( <i>Juta Rp</i> ) 2015 - 2019 .....	29
Gambar 2. Perbandingan Distribusi PDRB menurut Pengeluaran Tahun 2015 dan Tahun 2019 .....	30
Gambar 3. Pertumbuhan Beberapa Komponen Pengeluaran, 2015 - 2019 ( <i>Persen</i> ) .....	37

<https://magelangkota.bps.go.id>



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran ( <i>Juta Rupiah</i> ) .....	47
Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran ( <i>Juta Rupiah</i> ) .....	48
Lampiran 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran ( <i>Persen</i> ).....	49
Lampiran 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran ( <i>Persen</i> ).....	50
Lampiran 5. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (Tahun 2010=100) menurut Pengeluaran ( <i>Persen</i> ).....	51
Lampiran 6. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran (Tahun 2010=100) ( <i>Persen</i> ) .....	52
Lampiran 7. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran (Tahun 2010=100) ( <i>Persen</i> ) .....	53



*BAB I*

# **PENDAHULUAN**

<https://magelangkota.bps.go.id>



## 1.1. PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah/daerah/*region* tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 yang diharapkan dapat mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

### 1. Pendekatan Produksi

PDRB menurut pendekatan produksi adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah/daerah/*region* dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi, 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

## 2. Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah/daerah/*region* dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

## 3. Pendekatan Pengeluaran

PDRB menurut pendekatan pengeluaran adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga, (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tidak langsung neto.

### 1.2. KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah/daerah/*region*. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, atau setiap sektor, dari tahun ke tahun.

3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu wilayah/daerah/*region*. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah/daerah/*region*.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran dapat menunjukkan produk barang dan jasa yang digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri/luar wilayah.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan institusi dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.
7. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.



**BAB II**

**METODE ESTIMASI DAN SUMBER  
DATA**

<https://magangkota.bps.go.id>



## 2.1. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA (PKRT)

### 1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh institusi lain.

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama.

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations), sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alas kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka dalam penyajian di publikasi ini, 12 (dua belas) COICOP tersebut dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);  
Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen di luar wilayah atau di luar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

## 2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah:

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).
- Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk menghasilkan perhitungan PKRT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, masih diperlukan adanya beberapa penyesuaian (*adjustment*). Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai (di luar Susenas) dari beberapa komoditi tertentu. Hasil penghitungan dari data sekunder tersebut dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya. Penyesuaian (*adjustment*) yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan data indikator suplai untuk beberapa komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu.

Langkah penghitungan di atas, menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga (atas dasar harga) Berlaku. PKRT atas dasar harga Konstan 2010, diperoleh dengan cara men-*deflate* PKRT atas dasar harga Berlaku dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sebagai berikut:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
  - a. Makanan = pengeluaran konsumsi per kapita seminggu x (30/7) x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
  - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi per kapita sebulan x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Terhadap data poin ke 1 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas untuk jenis pengeluaran tertentu;
3. Data poin ke 2 dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) kelompok COICOP,
4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-*adjust*;

5. Susun Indeks Harga Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat) dan 7 kelompok COICOP;
6. PKRT atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

## 2.2. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT (PKLNPRT)

### 1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tidak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut:

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 (tujuh) jenis lembaga, yaitu: Organisasi

kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

Nilai Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PKLNPRT) sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis, barang cetakan; pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dan lain-lain.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dan lain-lain.

## 2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKLNPRT adalah:

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SKLNP).  
Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT.  
Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

PKLNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil Survei Khusus Lembaga Non Profit (SKLNP). Tahapan estimasi PKLNPRT adalah sebagai berikut:

- a. Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenisnya dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

- $\bar{x}_{ij}$  : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran
- $x_{ij}$  : PKLNPRRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran
- $n_i$  : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga
- $i$  : Jenis lembaga LNPRT,  $i = 1, 2, 3, \dots, 7$
- $j$  : Jenis pengeluaran LNPRT,  $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

b. Mengestimasi PKLNPRRT, dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

$X$  : PKLNPRRT atas dasar harga Berlaku

$N_i$  : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PKLNPRRT atas dasar harga Berlaku. PKLNPRRT atas dasar harga Konstan 2010, diperoleh dengan cara men-*deflate* PKLNPRRT atas dasar harga Berlaku dengan IHK tahun dasar 2010.

## 2.3. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PKP)

### 1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan dibidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa maupun aktivitas investasi.

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PKP mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai,

transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut:

- a. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
- b. Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

## 2. Metode Penghitungan

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Tahunan adalah:

- Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- Output Bank Indonesia (BI)
- Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

### a. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah atas dasar harga Berlaku

Secara umum, PK-P atas dasar harga Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut:

$$\text{PK-P atas dasar harga Berlaku} = \text{Output non pasar-penjualan barang dan jasa} + \text{Output Bank Indonesia}$$

Output non-pasar dihitung dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu: Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk atas dasar harga Berlaku dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah kab/kota itu sendiri + pengeluaran pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari kab/kota yang bersangkutan.

#### **b. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah atas dasar harga Konstan**

Pengeluaran konsumsi pemerintah atas dasar harga Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Harga Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

## **2.4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)**

### **1. Konsep, Definisi dan Cakupan**

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi di sini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

**PMTB terdiri dari:**

- a. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
- b. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
- c. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti overhaul mesin produksi; reklamasi pantai; pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan; serta pencegahan banjir dan erosi).

## 2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PMTB adalah:

- Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.
- Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
- Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil dan Rumah tangga (level provinsi).
- Laporan keuangan perusahaan.
- Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
- IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
- Publikasi Statistik Listrik, Gas dan Air Minum.
- Publikasi Statistik Konstruksi.
- Data Eksplorasi Mineral dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

- Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “*supply*” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

### **Pendekatan Langsung**

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (atas dasar harga) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai atas dasar harga berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB atas dasar harga Konstan, maka PMTB atas dasar harga Berlaku tersebut di “*deflate*” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

### **Pendekatan Tidak Langsung**

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik atas dasar harga Berlaku maupun atas dasar harga Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor.

Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasikan output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB atas dasar harga Berlaku. Untuk memperoleh nilai atas dasar harga Konstan adalah dengan men-*deflate* PMTB (atas dasar harga Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikan PMTB atas dasar harga Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB atas dasar harga Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB atas dasar harga Berlaku, nilai PMTB atas dasar harga Konstan tersebut di “*reflate*” (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB atas dasar harga Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

*Pertama*, PMTB atas dasar harga Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rincian tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Kedua*, untuk memperoleh PMTB atas dasar harga Konstan adalah dengan cara men-“*deflate*” PMTB atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB atas dasar harga Berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka dibidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan atas dasar harga Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB atas dasar harga Konstannya diperoleh dengan men-*deflate* nilai atas dasar harga Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

Untuk perangkat lunak, PMTB atas dasar harga Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk atas dasar

harga Konstan diperoleh dengan men-*deflate* nilai atas dasar harga Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data yang dikumpulkan antara lain nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB atas dasar harga Konstannya diperoleh dengan cara men-*deflate* nilai atas dasar harga Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

## 2.5. PERUBAHAN INVENTORI

### 1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, disamping tenaga kerja dan barang modal. Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Tetap Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang mempunyai nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang

perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga, pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut:

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku dan penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

## 2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah:

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait, dari survei atau dari mengunduh *website*

Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id));

- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalan;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian.

Terdapat 2 (dua) metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Dilihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

### **Pendekatan Langsung**

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori atas dasar harga Berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut:

- menghitung posisi inventori atas dasar harga Konstan, dengan cara men-*deflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori atas dasar harga Konstan dengan mengurangkan posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori atas dasar harga Berlaku dengan meng-*inflate* perubahan inventori atas dasar harga Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

## Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori atas dasar harga Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan, bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori atas dasar harga Konstan dihitung dengan:

- a. men-*deflate* nilai perubahan inventori atas dasar harga Berlaku dengan indeks harga yang sesuai,
- b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah:

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia.

## 2.6. EKSPOR IMPOR BARANG DAN JASA

### 1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

Ekspor-Impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari daerah
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari daerah  
Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya
- c. Net Ekspor antar daerah
  - Ekspor antar daerah
  - Impor antar daerah

## 2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi ekspor impor adalah:

- Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- Neraca Pembayaran Indonesia dari Bank Indonesia
- Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
- Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board* (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu, nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

**BAB III**

**TINJAUAN PEREKONOMIAN  
KOTA MAGELANG BERDASARKAN  
PDRB PENGELUARAN  
TAHUN 2015 - 2019**

<https://magelangkota.psp.id>



Perubahan struktur ekonomi Kota Magelang akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2015 sampai dengan 2019, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kota Magelang digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan Pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

### 3.1. TINJAUAN AGREGAT PDRB KOTA MAGELANG MENURUT PENGELUARAN

Kondisi perekonomian Kota Magelang menunjukkan tanda pemulihan, setelah berlalunya masa krisis yang melanda ekonomi dunia sejak tahun 2008. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang tetap menunjukkan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui Nilai PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan, serta pertumbuhan pada total PDRB.

**Tabel 1. PDRB Atas dasar harga Berlaku menurut Pengeluaran, 2015-2019**  
(Juta Rp)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
1. Konsumsi Rumah Tangga	3 761 371,65	3 968 957,52	4 265 950,56	4 582 514,70	4 941 300,63
2. Konsumsi LNPRT	84 752,32	89 943,37	95 207,58	105 064,64	117 661,89
3. Konsumsi Pemerintah	1 282 842,51	1 361 080,68	1 464 837,70	1 532 830,88	1 595 211,46
4. PMTB	3 249 864,22	3 459 854,74	3 754 540,39	4 226 016,14	4 568 883,95
5. Perubahan Inventori	215 926,59	119 399,88	110 320,99	130 044,47	94 007,98
6. Net Ekspor	-2 114 178,42	-1 975 336,11	-2 084 786,69	-2 375 110,60	-2 507 225,98
Total PDRB	6 480 578,87	7 023 900,08	7 606 070,53	8 201 360,23	8 809 839,93

\* Angka Sementara    \*\* Angka Sangat Sementara

Nilai PDRB Kota Magelang atas dasar harga Berlaku selama periode tahun 2015 sampai dengan 2019 menunjukkan penguatan dari tahun ke tahun. Penguatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume.

**Tabel 2. PDRB Atas dasar harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran, 2015-2019**  
(Juta Rupiah)

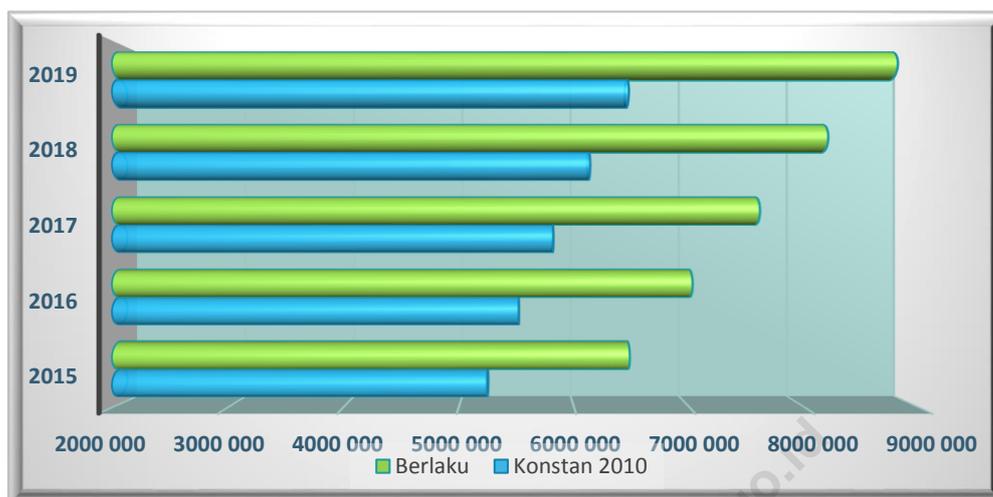
Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
1. Konsumsi Rumah Tangga	2 953 090,70	3 064 592,79	3 210 840,93	3 363 482,19	3 515 953,74
2. Konsumsi LNPR	62 601,20	63 969,58	66 317,52	71 540,04	78 371,22
3. Konsumsi Pemerintah	890 342,03	911 508,83	946 073,31	975 158,65	1 008 884,20
4. PMTB	2 462 088,98	2 575 598,00	2 718 446,34	2 921 113,44	3 055 040,77
5. Perubahan Inventori	70 182,40	87 351,64	61 524,35	64 672,89	64 898,08
6. Net Ekspor	-1 190 964,03	-1 181 495,30	-1 182 670,45	-1 257 344,46	-1 250 608,50
<b>Total PDRB</b>	<b>5 247 341,27</b>	<b>5 521 525,54</b>	<b>5 820 532,00</b>	<b>6 138 622,75</b>	<b>6 472 539,51</b>

\* Angka Sementara \*\* Angka Sangat Sementara

Selain dinilai atas dasar harga Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan atas dasar harga Konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran atas dasar harga Konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2015 - 2019, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kota Magelang berdasarkan PDRB atas dasar harga Konstan dapat dilihat pada Tabel 2 di atas. Sama halnya dengan PDRB atas dasar harga Berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga Konstan juga menunjukkan penguatan dari tahun ke tahun.

Dari gambar berikut, nampak bahwa nilai PDRB atas dasar harga Berlaku lebih besar dari nilai PDRB atas dasar harga Konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB atas dasar harga Berlaku sedangkan dalam PDRB atas dasar harga Konstan pengaruh harga telah ditiadakan.

**Gambar 1. Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran 2015-2019 (Juta Rp)**



Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PKRT), konsumsi akhir LNPRT (PKLNPR), konsumsi akhir pemerintah (PKP), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor.

**Tabel 3. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran, 2015-2019 (Persen)**

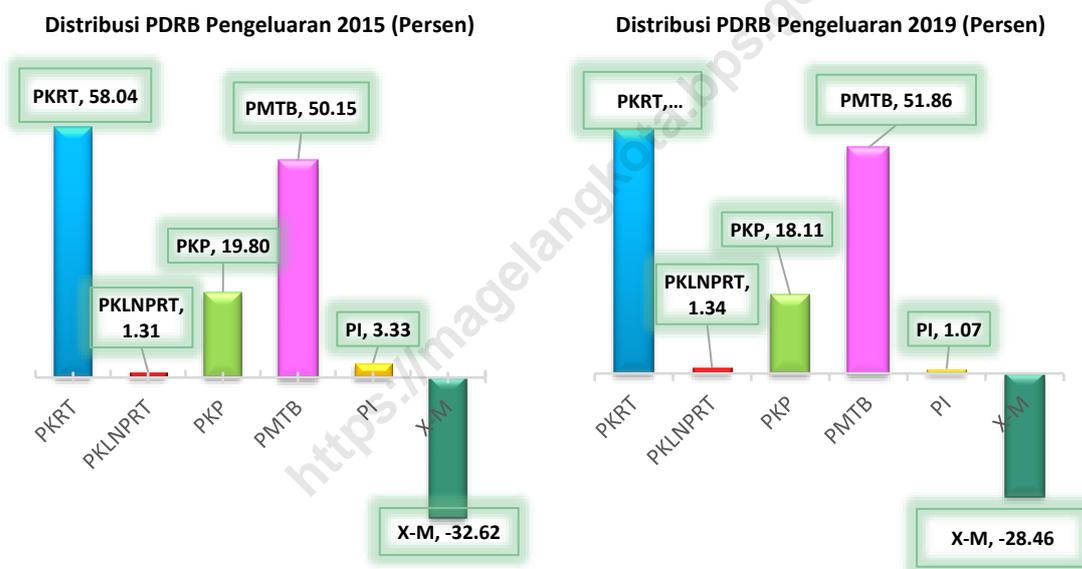
Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
1. Konsumsi Rumah Tangga	58,04	56,51	56,09	55,88	56,09
2. Konsumsi LNPRT	1,31	1,28	1,25	1,28	1,34
3. Konsumsi Pemerintah	19,80	19,38	19,26	18,69	18,11
4. PMTB	50,15	49,26	49,36	51,53	51,86
5. Perubahan Inventori	3,33	1,70	1,45	1,59	1,07
6. Net Ekspor	-32,62	-28,12	-27,41	-28,96	-28,46
<b>Total PDRB</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

\* Angka Sementara \*\* Angka Sangat Sementara

Berdasarkan Tabel 3 di atas terlihat bahwa selama periode 2015 – 2019, lebih dari separuh (lebih dari 50 persen) produk yang dikonsumsi di wilayah domestik masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga.

Ekspor dan Impor juga mempunyai peran yang relatif besar. Dari net ekspor yang negatif menunjukkan bahwa nilai impor Kota Magelang lebih besar dari nilai ekspornya. Sebagian besar permintaan domestik masih dipenuhi oleh produk dari impor (dari daerah lain). Pengeluaran untuk kapital (PMTB) memberi kontribusi sekitar 49-51 persen, sedangkan kontribusi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 18-19 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar. Pada tahun 2015 - 2019 perdagangan Kota Magelang yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor, menunjukkan bahwa nilai ekspor selalu lebih rendah dari nilai impor, yang berarti bahwa perdagangan Kota Magelang selalu menunjukkan posisi “defisit”.

**Gambar 2. Perbandingan Distribusi PDRB menurut Pengeluaran Tahun 2015 dan Tahun 2019**



X-M : Ekspor Neto

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kota Magelang dari tahun 2015 - 2019 secara rata-rata mencapai 5,33 persen, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 5,11 persen (2015); 5,23 persen (2016); 5,42 persen (2017); 5,46 persen (2018); dan 5,44 persen (2019). Pertumbuhan terkuat terjadi pada tahun 2018 yakni sebesar 5,46 persen, sebaliknya yang terlemah terjadi pada tahun 2015 (5,11 persen) meskipun keduanya menunjukkan arah yang sama.

**Tabel 4. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010  
menurut Pengeluaran, 2015-2019  
(Persen)**

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
1. Konsumsi Rumah Tangga	3,93	3,78	4,77	4,75	4,53
2. Konsumsi LNPRT	4,35	2,19	3,67	7,88	9,55
3. Konsumsi Pemerintah	3,39	2,38	3,79	3,07	3,46
4. PMTB	5,45	4,61	5,55	7,46	4,58
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
<b>Total PDRB</b>	<b>5,11</b>	<b>5,23</b>	<b>5,42</b>	<b>5,46</b>	<b>5,44</b>

\* Angka Sementara \*\* Angka Sangat Sementara

Sementara itu, indeks harga implisit PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) juga menunjukkan penguatan.

**Tabel 5. Indeks Harga Implisit PDRB menurut Pengeluaran, 2015-2019  
(Persen)**

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
1. Konsumsi Rumah Tangga	127,37	129,51	132,86	136,24	140,54
2. Konsumsi LNPRT	135,38	140,60	143,56	146,86	150,13
3. Konsumsi Pemerintah	144,08	149,32	154,83	157,19	158,12
4. PMTB	132,00	134,33	138,11	144,67	149,55
5. Perubahan Inventori	307,66	136,69	179,31	201,08	144,85
6. Net Ekspor	177,52	167,19	176,28	188,90	200,48
<b>Total PDRB</b>	<b>123,50</b>	<b>127,21</b>	<b>130,68</b>	<b>133,60</b>	<b>136,11</b>

\* Angka Sementara \*\* Angka Sangat Sementara

### 3.2. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Data pada Tabel 6 menunjukkan hal tersebut, dimana sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga. Dalam kurun waktu 2015 – 2019 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik dalam nominal (atas dasar harga Berlaku) maupun riil (atas dasar harga Konstan), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

**Tabel 6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga  
2015 - 2019**

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. Atas Dasar Harga B (Juta Rp)	3 761 371,65	3 968 957,52	4 265 950,56	4 582 514,70	4 941 300,63
b. Atas Dasar Harga K 2010 (Juta Rp)	2 953 090,70	3 064 592,79	3 210 840,93	3 363 482,19	3 515 953,74
Proporsi terhadap PDRB (% ATAS DASAR HARGA Berlaku)	58,04	56,51	56,09	55,88	56,09
Rata-rata konsumsi per-kapita/tahun (juta Rp)					
a. Atas Dasar Harga B	31,14	32,77	35,12	37,60	40,47
b. Atas Dasar Harga K 2010	24,45	25,30	26,43	27,60	28,79
Pertumbuhan <sup>1</sup> (% ATAS DASAR HARGA K)					
a. Total konsumsi RT	3,93	3,78	4,77	4,75	4,53
b. Perkapita	3,62	3,50	4,46	4,41	4,33
Jumlah Penduduk (orang) <sup>2</sup>	120 792	121 112	121 474	121 872	122 111

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

<sup>1</sup>Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ATAS DASAR HARGAK) 2010

<sup>2</sup>Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2010-2020

Proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2015 sampai dengan 2019 menunjukkan kecenderungan menurun. Pada tahun 2015 kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB sebesar 58,04 persen menjadi 56,09 persen pada tahun 2019. Penurunan proporsi komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB bukan berarti komponen ini tidak mengalami pertumbuhan, namun pertumbuhan nominal pada komponen ini masih lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan nilai PDRB

pada komponen pengeluaran yang lain sehingga proporsi terhadap total PDRB mengalami penurunan.

Penurunan kontribusi konsumsi rumah tangga ini bukan disebabkan karena berkurangnya kebutuhan rumah tangga tetapi meningkatnya kesadaran masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan sehingga masyarakat tidak lagi hanya memikirkan konsumsi rumah tangga namun juga memikirkan masa depan dengan mulai berinvestasi. Dengan kata lain kebutuhan rumah tangga tetap terpenuhi namun investasi baik berwujud fisik maupun tabungan tetap menjadi perhatian.

Secara umum, rata-rata konsumsi per kapita terus meningkat dari tahun ke tahun baik menurut harga berlaku maupun harga konstan. Pada tahun 2015 konsumsi rumah tangga per kapita sebesar 31,14 juta rupiah, yang artinya setiap penduduk Kota Magelang rata-rata mengeluarkan biaya sebesar 31,14 juta rupiah selama setahun untuk konsumsi, baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dll). Pengeluaran tersebut terus meningkat setiap tahun dan tahun 2019 rata-rata konsumsi per kapita sebesar 40,47 juta.

Apabila dilihat menurut harga konstan, pertumbuhan konsumsi per kapita periode tahun 2015 - 2019 berada pada kisaran 3,50 - 4,46 persen dan menunjukkan kecenderungan tumbuh lebih kuat. Pertumbuhan konsumsi per kapita setiap tahun baik menurut harga berlaku maupun harga konstan menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk Kota Magelang menguat, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Pertumbuhan konsumsi per kapita pada tahun 2015 sebesar 3,62 persen dan menjadi sebesar 4,33 persen pada tahun 2019.

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga atas dasar harga Konstan sebesar 3,93 persen pada tahun 2015. Kemudian, melemah pada tahun berikutnya dan meningkat kembali pada tahun 2017 yaitu berturut-turut sebesar 3,78 persen (2016) dan 4,77 persen (2017). Pada tahun 2019 pertumbuhan konsumsi rumah tangga tercatat cukup baik yaitu 4,53 walaupun angka ini menunjukkan perlambatan dibandingkan pertumbuhan komponen tersebut pada tahun 2018 yang besarnya 4,75. Nampak bahwa penguatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara “riil” lebih tinggi dari penguatan jumlah penduduk yang umumnya berada di bawah satu persen. Hal ini mengindikasikan terjadi perubahan tingkat kemakmuran masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini.

### 3.3. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Peranan konsumsi akhir LNPRT dalam PDRB menurut pengeluaran masih sangat kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya, yaitu hanya sekitar 1 persen saja. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah masih dapat ditingkatkan lagi. Beberapa lembaga yang memberikan andil cukup besar untuk PKLNPRT adalah organisasi kemasyarakatan (ormas), partai politik, dan lembaga keagamaan.

**Tabel 7. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT, 2015-2019**

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
Total Konsumsi LNPRT					
a. Atas Dasar Harga B (Juta Rp)	84 752,32	89 943,37	95 207,58	105 064,64	117 661,89
b. Atas Dasar Harga K 2010 (Juta Rp)	62 601,20	63 969,58	66 317,52	71 540,04	78 371,22
Proporsi terhadap PDRB (% Atas Dasar Harga B)	1,31	1,28	1,25	1,28	1,34
Pertumbuhan (% Atas Dasar Harga K)	4,35	2,19	3,67	7,88	9,55

\* Angka Sementara \*\* Angka Sangat Sementara

Dari tabel di atas, dapat dilihat pertumbuhan konsumsi LNPRT dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Pertumbuhan konsumsi LNPRT pada tahun 2015 tidak setinggi tahun sebelumnya karena pada tahun 2015 tidak ada agenda politik besar sehingga pengeluaran LNPRT cenderung normal. Pada tahun 2018, aktivitas politik menjelang pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun 2019 mendorong pertumbuhan konsumsi LNPRT Kota Magelang meningkat cukup tinggi dan pada puncaknya terjadi peningkatan pertumbuhan sebesar 9,55 persen pada tahun 2019.

### 3.4. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan konsumsi akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kota Magelang serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian di bawah ini.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik untuk atas dasar harga Berlaku maupun atas dasar harga Konstan 2010. Pada tahun 2015 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga Berlaku sebesar 1.282,84 milyar rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2019 nilainya mencapai 1.595,21 milyar rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga Konstan 2010, yang juga

mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Selama tahun 2015 – 2019, proporsi konsumsi pemerintah terhadap total PDRB cukup berfluktuasi. Sepanjang periode tersebut, proporsi tertinggi terjadi pada tahun 2015 yang mencapai 19,80 persen, sedangkan pada tahun 2019 proporsinya hanya 18,11 persen. Hal ini dikarenakan peningkatan konsumsi pemerintah pada tahun 2019 tidak setinggi peningkatan pada komponen pengeluaran yang lain sehingga walau secara nilai mengalami peningkatan tetapi proporsinya justru menurun.

**Tabel 8. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah, 2015-2019**

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
Total Konsumsi Pemerintah					
a. Atas Dasar Harga B (Juta Rp)	1 282 842,51	1 361 080,68	1 464 837,70	1 532 830,88	1 595 211,46
b. Atas Dasar Harga K 2010 (Juta Rp)	890 342,03	911 508,83	946 073,31	975 158,65	1 008 884,20
Proporsi terhadap PDRB (%Atas Dasar Harga B)	19,80	19,38	19,26	18,69	18,11
Konsumsi Pemerintah per-kapita (Juta Rp)					
a. Atas Dasar Harga B	10,62	11,24	12,06	12,58	13,06
b. Atas Dasar Harga K 2010	7,37	7,53	7,79	8,00	8,26
Pertumbuhan <sup>1)</sup>					
a. Total konsumsi Pemerintah	3,39	2,38	3,79	3,07	3,46
b. Konsumsi per-kapita	3,09	2,11	3,48	2,74	3,26
Jumlah Penduduk (orang)	120 792	121 112	121 474	121 872	122 111

\* Angka Sementara \*\* Angka Sangat Sementara

<sup>1)</sup>Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ATAS DASAR HARGAK) 2010

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per kapita. Pada tahun 2015 konsumsi pemerintah per kapita atas dasar harga Berlaku sebesar 10,62 juta rupiah dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2019 konsumsi pemerintah per kapita sebesar 13,06 juta rupiah.

Konsumsi akhir pemerintah secara “riil” menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per kapita). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur

pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah. Dalam kurun waktu 2015 - 2019, pertumbuhan konsumsi pemerintah terkuat terjadi pada tahun 2017, sebesar 3,79 persen, dan terlemah terjadi tahun 2016 sebesar 2,38 persen. Pertumbuhan konsumsi pemerintah tahun 2019 sebesar 3,46 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan konsumsi pemerintah per kapita sejalan dengan pertumbuhan konsumsi pemerintah secara total, pertumbuhan terkuat terjadi pada tahun 2017 (3,48 persen) dan terlemah terjadi tahun 2016 (2,11 persen).

### 3.5. PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect-input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun *riil*. Data di bawah menjelaskan bahwa secara keseluruhan laju pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2015 - 2019 mengalami perlambatan dari 5,45 persen (2015) menjadi 4,58 persen (2019).

Tabel 9. Perkembangan dan Struktur PMTB, 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
<b>Total PMTB</b>					
a. Atas Dasar Harga B (Juta Rp)	3 249 864,22	3 459 854,74	3 754 540,39	4 226 016,14	4 568 883,95
b. Atas Dasar Harga K 2010 (Juta Rp)	2 462 088,98	2 575 598,00	2 718 446,34	2 921 113,44	3 055 040,77
Proporsi terhadap PDRB (% Atas Dasar Harga B)	50,15	49,26	49,36	51,53	51,86
Pertumbuhan PMTB (%)	5,45	4,61	5,55	7,46	4,58

\* Angka Sementara \*\* Angka Sangat Sementara

### 3.6. PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “**persediaan**” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif. Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

**Tabel 10. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori, 2015-2019**

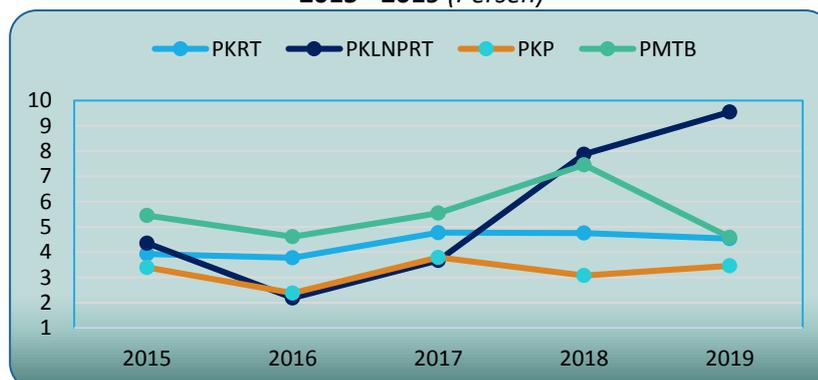
Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
<b>Total Nilai Inventori</b>					
a. Atas Dasar Harga B (Juta Rp)	215 926,59	119 399,88	110 320,99	130 044,47	94 007,98
b. Atas Dasar Harga K 2010 (Juta Rp)	70 182,40	87 351,64	61 524,35	64 672,89	64 898,08
Proporsi terhadap PDRB (% - Atas Dasar Harga B)	3,33	1,70	1,45	1,59	1,07

\* Angka Sementara \*\* Angka Sangat Sementara

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih dalam. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah proporsi, dalam PDRB besaran atau nilai proporsi komponen ini berfluktuasi.

Proporsi perubahan inventori terhadap PDRB mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 proporsinya sebesar 3,33 persen dan pada tahun 2019 proporsi perubahan inventori tersebut menurun menjadi 1,07 persen. Proporsi perubahan inventori terhadap PDRB pada tahun 2019 tersebut tercatat sebagai angka terlemah dalam periode 2015-2019.

**Gambar 3. Pertumbuhan Beberapa Komponen Pengeluaran 2015 - 2019 (Persen)**



### 3.7. PERKEMBANGAN NET EKSPOR BARANG DAN JASA

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik residen, sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB pengeluaran dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha. Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari *non resident*. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor.

Pada publikasi ini, komponen ekspor dan komponen impor tidak akan dibahas tersendiri melainkan akan dibahas menjadi satu komponen yaitu net ekspor. Net ekspor merupakan selisih dari nilai ekspor dan impor suatu wilayah. Komponen ini menunjukkan sejauh mana neraca perdagangan suatu daerah. Nilai net ekspor akan bertanda positif jika total ekspor lebih besar dari impor, sedangkan apabila nilai impor melebihi ekspor maka net ekspor akan bertanda negatif. Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan Kota Magelang terhadap ekonomi atau produk daerah lain. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kota Magelang di luar daerah, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Dengan kondisi tersebut komponen net ekspor Kota Magelang masih menunjukkan tanda negatif.

Nilai dan proporsi terhadap PDRB dari net ekspor barang dan jasa sangat fluktuatif, seperti terlihat pada Tabel 11 di bawah. Pada tahun 2015 nilai komponen net ekspor atas dasar harga berlaku bernilai -2.114,18 milyar rupiah sedangkan nilai net ekspor atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 sebesar -2.507,22 milyar rupiah. Nilai net ekspor dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa impor barang dan jasa di Kota Magelang pada kurun waktu 2016 sampai dengan 2019 masih lebih dominan dibandingkan dengan ekspor barang dan jasa. Kondisi ini didukung oleh fenomena sebagian besar barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk kota magelang berasal dari luar Kota Magelang.

Berdasarkan proporsi terhadap total PDRB, net ekspor pada tahun 2015 memiliki proporsi sebesar -32,62 persen dan -28,46 persen pada tahun 2019. Apabila dilihat dari tanda (negatif) maka proporsi komponen net ekspor terhadap total PDRB dari tahun 2016 ke tahun 2019 terlihat menurun. Hal ini ditunjukkan dengan nilai net ekspor dari tahun ke tahun semakin besar negatifnya.

**Tabel 11. Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa , 2015- 019**

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
Total Nilai Net Ekspor					
a. Atas Dasar Harga B (Juta Rp)	-2 114 178,42	-1 975 336,11	-2 084 786,69	-2 375 110,60	-2 507 225,98
b. Atas Dasar Harga K 2010 (Juta Rp)	-1 190 964,03	-1 181 495,30	-1 182 670,45	-1 257 344,46	-1 250 608,50
Proporsi terhadap PDRB (% - Atas Dasar Harga B)	-32,62	-28,12	-27,41	-28,96	-28,46

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara



**BAB IV**  
**PENUTUP**

<https://magelangkota.bps.go.id>



1. PDRB Kota Magelang menurut pengeluaran tahun 2015 - 2019 merupakan gambaran perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kota Magelang pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Nominal PDRB Kota Magelang tahun 2019 atas dasar harga Berlaku mencapai 8.809,84 milyar rupiah. Dari nilai sebesar itu sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir, yaitu konsumsi rumah tangga, LNPRT dan pemerintah yang mencapai 75,54 persen dimana 56,09 persennya adalah konsumsi rumah tangga. Dengan peranan konsumsi rumah tangga yang sangat dominan, tidak dapat dipungkiri bahwa komponen ini adalah penopang dan penggerak utama pertumbuhan ekonomi Kota Magelang. Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Magelang sebesar 5,44 persen sedangkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tahun 2019 di Kota Magelang sebesar 4,53 persen atau menyumbang 2,48 persen dari total pertumbuhan ekonomi Kota Magelang.
3. Peranan investasi dalam perekonomian selalu merupakan *issue* yang menarik untuk diulas, karena investasi dalam bentuk modal fisik akan digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi yang keluarannya adalah output. Peranan investasi dalam PDRB Pengeluaran Kota Magelang dapat didekati dari proporsi PMTB dalam PDRB. Proporsi PMTB terhadap PDRB pada periode 2015-2019 berada pada kisaran 49-51 persen, atau dapat dikatakan peranan investasi dalam perekonomian Kota Magelang pada periode 2015-2019 sekitar 50 persen.
4. PDRB Kota Magelang 2019 terlihat belum dapat memenuhi seluruh permintaan akhir, sehingga kekurangan *supply* diperoleh dari impor. Hal ini dapat dilihat dari besarnya nilai impor dibandingkan dengan nilai ekspornya. Impor yang dimaksud disini adalah impor dari luar daerah baik dari luar kabupaten/kota se provinsi maupun dari provinsi lain. Peranan impor dalam perekonomian Kota Magelang cukup besar dan nilainya meningkat dari tahun ke tahun.

5. Dari seluruh data, indikator dan ulasan yang ditampilkan dalam publikasi ini dapat dimanfaatkan oleh para pengguna data untuk berbagai keperluan, seperti perencanaan, evaluasi dan berbagai analisis ekonomi lainnya. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, juga dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.

<https://magelangkota.bps.go.id>

## **LAMPIRAN**

<https://magelangkota.bps.go.id>



**Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku  
menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)**

<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018*</b>	<b>2019**</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga</b>	<b>3 761 371,65</b>	<b>3 968 957,52</b>	<b>4 265 950,56</b>	<b>4 582 514,70</b>	<b>4 941 300,63</b>
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	<b>84 752,32</b>	<b>89 943,37</b>	<b>95 207,58</b>	<b>105 064,64</b>	<b>117 661,89</b>
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah</b>	<b>1 282 842,51</b>	<b>1 361 080,68</b>	<b>1 464 837,70</b>	<b>1 532 830,88</b>	<b>1 595 211,46</b>
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto</b>	<b>3 249 864,22</b>	<b>3 459 854,74</b>	<b>3 754 540,39</b>	<b>4 226 016,14</b>	<b>4 568 883,95</b>
<b>5. Perubahan Inventori</b>	<b>215 926,59</b>	<b>119 399,88</b>	<b>110 320,99</b>	<b>130 044,47</b>	<b>94 007,98</b>
<b>6. Net Ekspor</b>	<b>-2 114 178,42</b>	<b>-1 975 336,11</b>	<b>-2 084 786,69</b>	<b>-2 375 110,60</b>	<b>-2 507 225,98</b>
<b>P D R B</b>	<b>6 480 578,87</b>	<b>7 023 900,08</b>	<b>7 606 070,53</b>	<b>8 201 360,23</b>	<b>8 809 839,93</b>

\* angka sementara

\*\* angka sangat sementara

**Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010  
menurut Pengeluaran (*Juta Rupiah*)**

<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018*</b>	<b>2019**</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga</b>	2 953 090,70	3 064 592,79	3 210 840,93	3 363 482,19	3 515 953,74
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	62 601,20	63 969,58	66 317,52	71 540,04	78 371,22
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah</b>	890 342,03	911 508,83	946 073,31	975 158,65	1 008 884,20
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto</b>	2 462 088,98	2 575 598,00	2 718 446,34	2 921 113,44	3 055 040,77
<b>5. Perubahan Inventori</b>	70 182,40	87 351,64	61 524,35	64 672,89	64 898,08
<b>6. Net Ekspor</b>	-1 190 964,03	-1 181 495,30	-1 182 670,45	-1 257 344,46	-1 250 608,50
<b>P D R B</b>	<b>5 247 341,27</b>	<b>5 521 525,54</b>	<b>5 820 532,00</b>	<b>6 138 622,75</b>	<b>6 472 539,51</b>

\* angka sementara

\*\* angka sangat sementara

**Lampiran 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto  
Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran (Persen)**

<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018*</b>	<b>2019**</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga</b>	<b>58,04</b>	<b>56,51</b>	<b>56,09</b>	<b>55,88</b>	<b>56,09</b>
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	<b>1,31</b>	<b>1,28</b>	<b>1,25</b>	<b>1,28</b>	<b>1,34</b>
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah</b>	<b>19,80</b>	<b>19,38</b>	<b>19,26</b>	<b>18,69</b>	<b>18,11</b>
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto</b>	<b>50,15</b>	<b>49,26</b>	<b>49,36</b>	<b>51,53</b>	<b>51,86</b>
<b>5. Perubahan Inventori</b>	<b>3,33</b>	<b>1,70</b>	<b>1,45</b>	<b>1,59</b>	<b>1,07</b>
<b>6. Net Ekspor</b>	<b>-32,62</b>	<b>-28,12</b>	<b>-27,41</b>	<b>-28,96</b>	<b>-28,46</b>
<b>P D R B</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

\* angka sementara

\*\* angka sangat sementara

**Lampiran 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto  
Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran (*Persen*)**

<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018*</b>	<b>2019**</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga</b>	<b>3,93</b>	<b>3,78</b>	<b>4,77</b>	<b>4,75</b>	<b>4,53</b>
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	<b>4,35</b>	<b>2,19</b>	<b>3,67</b>	<b>7,88</b>	<b>9,55</b>
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah</b>	<b>3,39</b>	<b>2,38</b>	<b>3,79</b>	<b>3,07</b>	<b>3,46</b>
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto</b>	<b>5,45</b>	<b>4,61</b>	<b>5,55</b>	<b>7,46</b>	<b>4,58</b>
<b>5. Perubahan Inventori</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. Net Ekspor</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>P D R B</b>	<b>5,11</b>	<b>5,23</b>	<b>5,42</b>	<b>5,46</b>	<b>5,44</b>

\* angka sementara

\*\* angka sangat sementara

**Lampiran 5. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (Tahun 2010=100)  
menurut Pengeluaran (Persen)**

<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018*</b>	<b>2019**</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga</b>	<b>127,37</b>	<b>129,51</b>	<b>132,86</b>	<b>136,24</b>	<b>140,54</b>
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPR</b>	<b>135,38</b>	<b>140,60</b>	<b>143,56</b>	<b>146,86</b>	<b>150,13</b>
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah</b>	<b>144,08</b>	<b>149,32</b>	<b>154,83</b>	<b>157,19</b>	<b>158,12</b>
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto</b>	<b>132,00</b>	<b>134,33</b>	<b>138,11</b>	<b>144,67</b>	<b>149,55</b>
<b>5. Perubahan Inventori</b>	<b>307,66</b>	<b>136,69</b>	<b>179,31</b>	<b>201,08</b>	<b>144,85</b>
<b>6. Net Ekspor</b>	<b>177,52</b>	<b>167,19</b>	<b>176,28</b>	<b>188,90</b>	<b>200,48</b>
<b>P D R B</b>	<b>123,50</b>	<b>127,21</b>	<b>130,68</b>	<b>133,60</b>	<b>136,11</b>

\* angka sementara

\*\* angka sangat sementara

**Lampiran 6. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto  
Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran (Tahun 2010=100) (Persen)**

<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018*</b>	<b>2019**</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga</b>	<b>158,58</b>	<b>163,33</b>	<b>135,37</b>	<b>141,81</b>	<b>148,23</b>
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	<b>182,59</b>	<b>193,77</b>	<b>142,87</b>	<b>154,12</b>	<b>168,84</b>
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah</b>	<b>168,13</b>	<b>178,38</b>	<b>123,99</b>	<b>127,80</b>	<b>132,22</b>
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto</b>	<b>165,35</b>	<b>176,03</b>	<b>138,31</b>	<b>148,62</b>	<b>155,43</b>
<b>5. Perubahan Inventori</b>	<b>1252,53</b>	<b>692,61</b>	<b>356,89</b>	<b>375,15</b>	<b>376,46</b>
<b>6. Net Ekspor</b>	<b>183,31</b>	<b>171,27</b>	<b>102,54</b>	<b>109,02</b>	<b>108,43</b>
<b>P D R B</b>	<b>161,58</b>	<b>175,13</b>	<b>145,12</b>	<b>153,06</b>	<b>161,38</b>

\* angka sementara

\*\* angka sangat sementara

**Lampiran 7. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto  
Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran (Tahun 2010=100) (Persen)**

<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018*</b>	<b>2019**</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga</b>	<b>124,50</b>	<b>129,20</b>	<b>135,37</b>	<b>141,81</b>	<b>148,23</b>
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	<b>134,87</b>	<b>137,81</b>	<b>142,87</b>	<b>154,12</b>	<b>168,84</b>
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah</b>	<b>116,69</b>	<b>119,46</b>	<b>123,99</b>	<b>127,80</b>	<b>132,22</b>
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto</b>	<b>125,27</b>	<b>131,04</b>	<b>138,31</b>	<b>148,62</b>	<b>155,43</b>
<b>5. Perubahan Inventori</b>	<b>407,11</b>	<b>506,70</b>	<b>356,89</b>	<b>375,15</b>	<b>376,46</b>
<b>6. Net Ekspor</b>	<b>103,26</b>	<b>102,44</b>	<b>102,54</b>	<b>109,02</b>	<b>108,43</b>
<b>P D R B</b>	<b>130,83</b>	<b>137,67</b>	<b>145,12</b>	<b>153,06</b>	<b>161,38</b>

\* angka sementara

\*\* angka sangat sementara



## ***DAFTAR PUSTAKA***

<https://magelangkota.bps.go.id>



1. Badan Pusat Statistik, *Sistem Neraca Nasional 2008*, Jakarta, 2013.
2. \_\_\_\_\_, *Pedoman Penyusunan PDRB Kabupaten/Kota Tahun Dasar 2010 Menurut Pengeluaran*, Jakarta, 2014.
3. \_\_\_\_\_, *Booklet Perubahan Tahun Dasar PDB Berbasis SNA 2008*, Jakarta, 2014.
4. \_\_\_\_\_, *Produk Domestik Bruto menurut Penggunaan 2008-2013*, Jakarta, 2014
5. BPS Provinsi Jawa Tengah, *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*, berbagai seri, Semarang.
6. BPS Kota Magelang, *Kota Magelang dalam Angka*, berbagai seri, Magelang.

<https://magelangkota.bps.go.id>



Sensus  
Penduduk  
2020

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA MAGELANG**

Jalan Jenderal Gatot Subroto No.54D Magelang 56123



bps3371@bps.go.id



BPS Kota Magelang

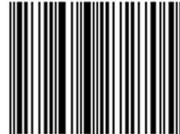


magelangkota.bps.go.id



bps3371magelang

ISSN 2686-2727



9 772686 272705